

MENEMUKENALI PERILAKU PEMILIH PADA  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI KOTA BENGKULU

OLEH :

Hernowo Novi Yanto<sup>1</sup>  
Alexsander<sup>2</sup>

ABSTRAK

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian yang dilakukan pada tema Menemukan Model Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Bengkulu untuk mengungkap gejala-gejala perilaku pemilih di Kota Bengkulu, sehingga dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian dapat mengidentifikasi apakah kecenderungan perilaku pemilih mengarah pada pendekatan sosiologis, psikologis atau pilihan rasional. Untuk mendapatkan data di lapangan, penulis menggunakan pendekatan *field research* dengan menggabungkan dua pendekatan yang diawali *survey* terlebih dahulu, dimana data disajikan dalam bentuk statistik deskriptif terkait dengan pengumpulan data yang bersumber dari responden yang kemudian mendalami alasan-alasan atau fenomena-fenomena, sifat dan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan relevansinya pada tema penelitian. Adapun variabel pada penelitian tersebut terdiri dari satu variabel yaitu perilaku pemilih, sementara dimensi yang akan dilihat adalah dimensi perilaku pemilih dilihat dari model sosiologis, psikologis dan model pilihan rasional. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa: kecenderungan perilaku pemilih pada pendekatan sosiologis hanya 41,7 %, sementara untuk pendekatan psikologis sebesar 42,7 %. Selanjutnya untuk pendekatan rasional pilihan responden sebanyak 51,9 % dan terakhir untuk pendekatan pragmatis sebanyak 46,8 %. Meskipun pendekatan rasional lebih unggul akan tetapi pilihan tersebut tidak begitu dominan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya praktek money politic yang ada di lapangan pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif.

**Keywords:** *Perilaku Pemilih . Pemilihan Umum Legislatif 2014.*

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu

<sup>2</sup> Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu

### A. Pendahuluan

Pemilu 2004 menunjukkan perilaku pemilih yang berbeda. Antusiasme pemilih mulai menurun dan perilakunya sudah mulai bercorak rasional. Bahkan menurut Marijan (2010) sudah tergolong rasional pragmatis dengan melakukan praktik-praktik transaksional (jual beli suara) di mana pemilih mulai menghitung imbalan dari suara yang diberikan. Perilaku ini tidak lepas dari penilaian bahwa wakil-wakil rakyat hasil pemilu 1999 yang mereka harapkan ternyata tak mampu berbuat banyak dan tidak memberikan perubahan berarti. Kalaupun ada, yang memperoleh keuntungan dari perubahan itu adalah wakil rakyat itu sendiri.

Selanjutnya fenomena lain, berdasarkan hasil survei nasional *Center for Democracy and Leadership Research* pada 33 propinsi tentang 'Membaca Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014', bahwa terdapat beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional ini. Pertama, sebanyak 79% atau hampir 80% pemilih di Indonesia menyatakan "berminat" untuk berpartisipasi (memberikan suara) dalam pemilu legislatif 2014. Artinya, ada 21% pemilih yang berpotensi tidak menggunakan hak suaranya (golput), itu belum termasuk golput teknis karena tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kedua, berdasarkan survei ini, PDIP (18,5%) dan Golkar (16,9%) mempunyai tingkat keterpilihan (elektabilitas) cenderung stabil dua digit. Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS adalah partai yang paling tidak stabil jika memperhatikan hasil pemilu 2009. Partai Demokrat menurun drastis dari 20,85% pada Pemilu 2009 menjadi 8,8%, dan PKS dari 7,88% di Pemilu 2009 menjadi 2,9%.

Ketiga, berdasarkan survei ini, perilaku memilih publik cenderung ditentukan oleh figur atau tokoh kandidat. Publik lebih memilih (mencoblos) caleg (69%) dibandingkan partai politik peserta pemilu (12%). Artinya, kandidat capres maupun caleg berperan penting sebagai street level politicians yang menampilkan perwajahan partainya.

Keempat, latar belakang caleg sebagai figur baru dan muda (68,4%) paling disukai oleh pemilih, disusul caleg berlatar belakang politis/pengurus partai (64,8%), purnawirawan (61,8%), atau pejabat/birokrat (61,9%). Sementara caleg dengan latar

belakang artis/selebritis paling sedikit diminati pemilih (18,7%).

Kelima, dalam motif pilihan terhadap partai, program partai (34,2%) merupakan alasan tertinggi publik memilih partai, disusul alasan adanya figur tokoh yang diidolakan (17,8%). Sementara alasan karena kesesuaian antara keyakinan dengan asas/ideologi partai hanya 10%. Di sisi lain, korupsi (49%) adalah faktor paling berpengaruh terhadap kegagalan partai pada pemilu, dibandingkan faktor lainnya. Sementara itu, citra partai politik (24%) dan kinerja partai (23,7%) dianggap oleh publik sebagai faktor kesuksesan partai dalam pemilu, baru kemudian tokoh partai (11,9%) menjadi variabel ketiga.

Dua aspek paling krusial yang harus dilakukan partai politik menurut pemilih adalah kepedulian partai terhadap masyarakat (46%) dan integritas partai (citra bersih) (33%). Artinya, jika dua hal ini bisa ditunjukkan melalui program-program yang peduli persoalan masyarakat dan integritas partai terjaga dalam persepsi publik, maka partai akan mendapatkan simpati publik dalam pemilu 2014 ke depan.

Meskipun dari beberapa konsep dan hasil penelitian menyebutkan bahwa perilaku pemilih pada pemilu baik pemilu legislatif, pilkada atau pilpres mengungkap bahwa kecendrungan perilaku mengarah pada pilihan rasional namun trend tersebut masih harus dibandingkan dengan pendekatan perilaku pemilih.

Penelitian yang dilakukan pada tema *Menemukan Model Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Bengkulu* untuk mengungkap gejala-gejala perilaku pemilih di Kota Bengkulu, sehingga dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian dapat mengidentifikasi apakah kecendrungan perilaku pemilih mengarah pada pendekatan sosiologis, psikologis atau pilihan rasional.

### B. Tinjauan Pustaka

Partisipasi politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik warga negara. Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 1998: 3) memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Dari definisi tersebut, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang

bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Partisipasi politik banyak diwujudkan dalam berbagai bentuk. Beberapa diantaranya adalah *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi (*contacting*), tindak kekerasan (*violence*), dan kegiatan pemilihan. Kegiatan yang terakhir ini mencakup suara sekaligus sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Secara lebih spesifik, Budiardjo (1998; 3) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya.

Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, ada yang menentang dan ada yang menaati serta mempengaruhi dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992 : 13).

Kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Menurut Zainuddin A. Rakhman (dalam Sastroatmodjo, 1995 : 24-25), secara sosiokultural, masyarakat Indonesia memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis dalam pola-pola budaya politiknya. Dualisme tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) dualisme antara kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan, (2) dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan, dan (3) dualisme yang

merupakan implikasi masuknya nilai-nilai barat di dalam masyarakat Indonesia.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai-nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan dan agama apapun merupakan pedoman dan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya. Proses-proses politik dan partisipasi warga paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman seseorang.

Pendekatan yang pertama adalah *pendekatan sosiologis*. Pendekatan ini merupakan pendekatan perilaku memilih yang berasal dari Eropa, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang berlatar belakang pendidikan Eropa. Pendekatan ini disebut dengan **Mahzab Columbia**. Sedangkan Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. Ketika David Denver menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, ia menyebutnya dengan *sosial determinism approach* (Asfar, 2006 : 137).

Pendekatan ini lebih menekankan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, organisasi dan sebagainya serta karakteristik sosiologis seperti agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya merupakan faktor penting untuk menjelaskan pilihan politik. Pendeknya, perilaku memilih dapat dijelaskan akibat pengaruh identifikasi seseorang terhadap suatu kelompok sosial dan norma-norma yang dianut oleh kelompok atau organisasinya.

Lazarsfeld (dalam Riswanda dan Gaffar, 1993 : 15), menjelaskan perilaku politik sosiologis merupakan

*“A person thinks, politically as he is socially. Sosial characteristics determine political reference.”*

Teori yang menggunakan pendekatan ini adalah *contagion theory* atau teori penularan. Menurut teori ini, pilihan politik seseorang

dan *partisipanship* (semangat berpartisipasi seseorang dalam kehidupan politik) dapat menular kepada orang lain melalui kontak sosial seperti penyakit infeksi. Dengan kata lain, perilaku politik seseorang disebabkan apa yang dibicarakan bersama yang akhirnya menjadi pilihan bersama (Martin Harrop dan William Millor, 1987 : 200).

Jadi, menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dari luar melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses sosialisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataan bahwa perilaku memilih tidak hanya suatu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara, individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan individu tersebut menyimpang dari keyakinan kelompoknya ketika dia akan melakukan tindakan politik.

Pendekatan yang kedua adalah *pendekatan psikologis*. Pendekatan ini dikembangkan sebagai respons atas pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis dikembangkan di *University of Michigan* di Amerika Serikat, sehingga kemudian pendekatan perilaku memilih ini dikenal dengan sebutan mazhab Michigan (*Michigan School*). Pelopor pendekatan ini adalah August Campbell (Asfar, 2006 : 141).

Kemunculan pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologis sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi pendekatan ini hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai tertentu sementara yang lain tidak.

Menurut pendekatan ini, salah satu kekuatan politik adalah produk dari sikap dan disposisi seorang pemilih. Pendekatan ini lebih mendasarkan faktor psikologis dalam diri seseorang. Faktor psikologis ini, menurut Riswanda Imawan (1993 : 12-13) dideteksi dengan dua konsep:

- **Political involvement**, yakni perasaan penting atau tidak ingin terlibat dalam isu-isu politik yang bersifat umum.
- **Party identification**, yakni preferensi (perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap satu partai politik atau kelompok elit tertentu).

Seperu namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Menurut pendekatan ini, sosialisasilah yang sebenarnya menentukan perilaku memilih maupun perilaku politik seseorang, bukan karakter sosiologis. Selain itu, pendekatan ini juga menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek utama yaitu, ikatan emosional pada partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi pada kandidat.

Selain dua pendekatan tersebut, perilaku dapat didekati dengan pendekatan rasional. Pendekatan ini berkembang atas kritik kepada kedua pendekatan dalam perilaku memilih baik pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis yang menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang kosong. Pemilih seakan-akan menjadi pion yang mudah ditebak langkahnya. Dengan demikian, penjelasan-penjelasan perilaku memilih tidaklah harus permanen, seperti karakteristik sosiologis dan identifikasi partai tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa dramatik yang juga menyangkut peristiwa-peristiwa yang mendasar.

Penggunaan *pendekatan rasional* dalam perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Masyarakat dapat bertindak rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Maka dalam perilaku memilih rasional (*rational choice*), pemilih bertindak rasional yaitu memilih kandidat atau partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya. Dengan begitu, para pemilih diasumsikan mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan dan mampu menilai isu-isu tersebut. Penilaian rasional terhadap isu politik dan kandidat ini dapat berupa jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi di bidangnya masing-

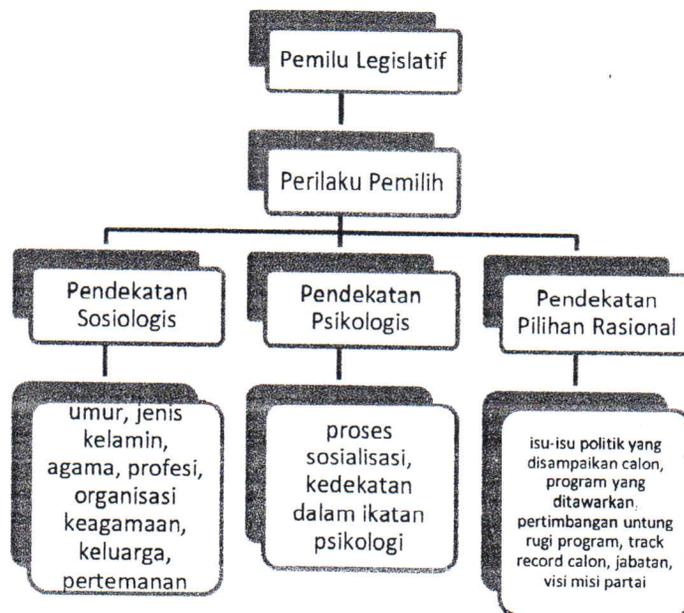
masing seperti seni, olahraga, film, organisasi politik, dan sebagainya.

Dalam khasanah perilaku memilih, pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan isu dan kandidat di atas juga dikenal dengan *teori spasial* (Asfar, 2006 : 148). Teori ini mengasumsikan bahwa para pemilih memilih kandidat yang paling mewakili posisi kebijakan dan kandidat yang dapat memaksimalkan aspirasi mereka. Hufedlt Carmines menjelaskan bahwa perilaku memilih yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan kepentingan diri sendiri disebut sebagai tradisi ekonomi politik (*political economy tradition*).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggunakan tersebut peneliti menggunakan ketiga pendekatan, sehingga hasil penelitian

dapat mengarah pada model yang paling dominan dalam pemilu legislatif 2014 di Kota Bengkulu.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



### C. Metode Penelitian

Penelitian tersebut merupakan jenis *field research* dengan menggabungkan dua pendekatan yang diawali *survey* terlebih dahulu, dimana data disajikan dalam bentuk statistik deskriptif terkait dengan pengumpulan data yang bersumber dari responden yang kemudian mendalami alasan-alasan atau fenomena-fenomena, sifat dan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan relevansinya pada tema penelitian. Terkait dengan penentuan sampel peneliti menggunakan tabel penentuan sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (dalam Sugiyono, 2009:87). Dimana taraf kesalahan

yang digunakan dalam sampel tersebut sebesar 10 % . merujuk pada teknik *sample* maka untuk Kecamatan Gading Cempaka *sample* yang diambil sebanyak 268 dan Kecamatan Teluk Segara sebanyak 266 orang dan total *sample* dari populasi yang diambil adalah 534 orang.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana yang disampaikan pada sub-bab karakteristik informan bahwa data yang dianalisis adalah dari sosiodemografi pendidikan dan pekerjaan/profesi. Kecenderungan perilaku pemilih berdasarkan karakteristik sosiodemografi yang dibahas

terlebih dahulu dilihat pada dua wilayah kecamatan yang selanjutnya ditotal secara keseluruhan untuk melihat kecenderungan yang ada di Kota Bengkulu.

Berikut ini masing-masing gambaran pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Compaka.

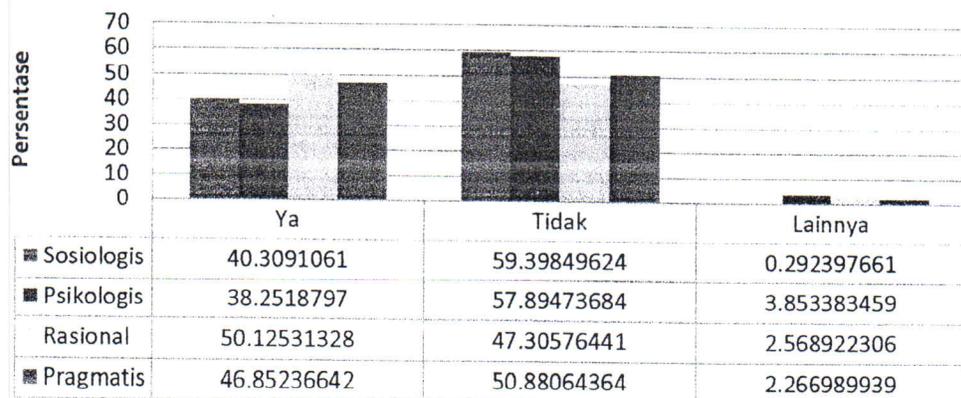
#### 1. Kecamatan Teluk Segara

Berdasarkan hasil olah data distribusi perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Teluk Segara lebih cenderung tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Teluk segara secara berturut-turut yakni, 59,39 %, 57,89% dan 50,88 %. Sedangkan untuk kecenderungan perilaku berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di

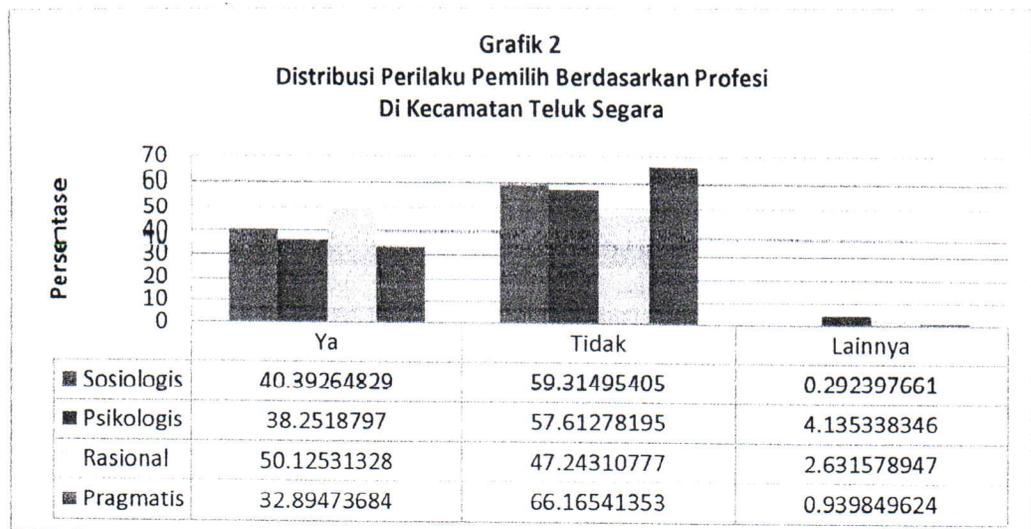
kecamatan Teluk segara secara berturut-turut yakni, 40,30 %, 38,25% dan 46,85 %. Adapun kecenderungan perilaku yang sangat positif ditunjukkan pada pandangan rasional yakni sebesar 50,12% pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Teluk Segara mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, sedangkan untuk pertimbangan irasional berkisar 47,30%, dan sisanya sebesar 2,56% tidak menyatakan sikapnya pada pandangan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin terdidik pemilih maka kecenderungan mereka menjadi pemilih yang cerdas akan semakin tinggi.

Lebih lanjut terkait dengan hasil olah data distribusi perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Teluk Segara dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1  
Distribusi Perilaku Pemilih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Teluk Segara



Sumber : Olah data primer 2014



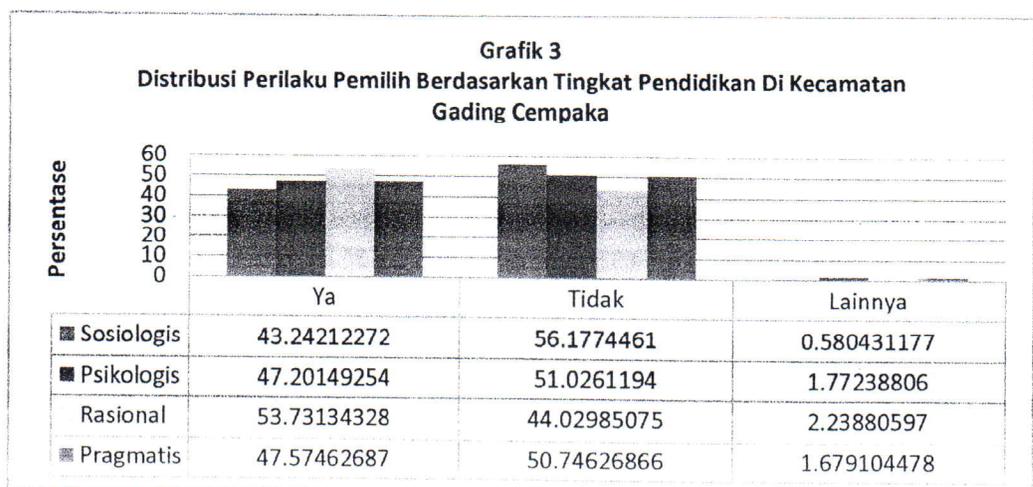
Sumber : Olah data primer 2014

Dari grafik 2 di atas dapat kita lihat bersama, bahwa berdasarkan Profesi/pekerjaan di Kecamatan Teluk Segara secara hampir sama pada tingkat pendidikan, yakni keseluruhan perilaku pemilih lebih condong tidak mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan pragmatis dalam menentukan pilihannya. Hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Teluk segara secara berturut-turut yakni, 59,31 %, 57,61% dan 66,16 %. Sedangkan untuk kecenderungan perilaku berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Teluk segara secara berturut-turut yakni, 40,39 %, 38,25%, dan 32,89 %.

Adapun kecenderungan perilaku yang sangat positif juga ditunjukkan pada pandangan rasional yakni sebesar 50,12 % pemilih berdasarkan profesi di Kecamatan Teluk Segara mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, sedangkan untuk pertimbangan irasional berkisar 47,24%, dan sisanya sebesar 2,63% tidak menyatakan sikapnya pada pandangan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kecamatan Teluk Segara telah masuk dalam kategori pemilih cerdas.

## 2. Kecamatan Gading Cempaka

Berdasarkan hasil olah data distribusi perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Teluk Segara dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini



Sumber : Olah data primer 2014

Berdasarkan grafik di atas, dapat kita lihat bersama bahwa perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Gading Cempaka hampir berimbang, meskipun secara persentase lebih cenderung tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Gading Cempaka secara berturut-turut yakni, 56,17 %, 51,02%, dan 50,74 %. Sedangkan untuk kecenderungan perilaku berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Gading Cempaka secara berturut-turut yakni, 43,24 %, 47,20%, dan 47,57%.

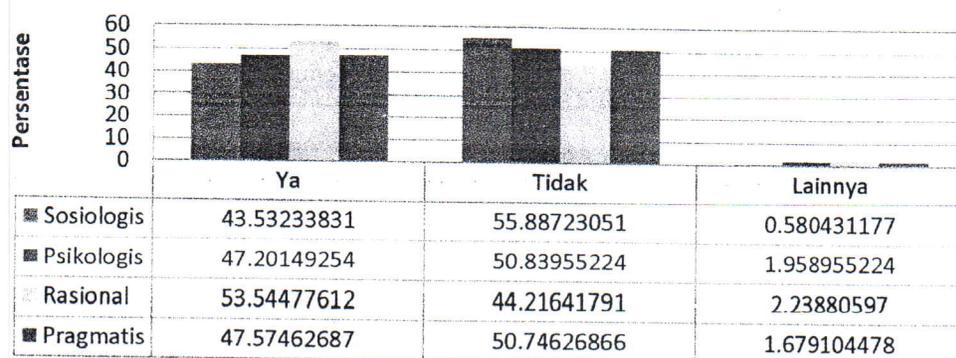
Adapun kecenderungan perilaku yang sangat positif ditunjukkan pada pandangan rasional yakni sebesar 53,73 % pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Gading Cempaka mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, sedangkan untuk pertimbangan irasional berkisar 44,02%, dan sisanya sebesar 2,23% tidak menyatakan sikapnya pada pandangan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin terdidik pemilih maka kecenderungan mereka menjadi pemilih yang cerdas akan semakin tinggi.

Selanjutnya berdasarkan hasil olah data distribusi perilaku pemilih berdasarkan

Profesi/pekerjaan di Kecamatan Gading Cempaka dapat dilihat pada grafik 4 dapat dikategorikan hampir sama pada tingkat pendidikan, yakni hampir berimbang, meskipun secara persentase lebih cenderung tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis dalam menentukan pilihannya.

Hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Gading Cempaka secara berturut-turut yakni, 55,88 %, 50,83%, dan 50,74 %. Sedangkan untuk kecenderungan perilaku berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di kecamatan Gading Cempaka secara berturut-turut yakni, 43,53 %, 47,20 % dan 47,57 %. Adapun kecenderungan perilaku yang sangat positif juga ditunjukkan pada pandangan rasional yakni sebesar 53,54% pemilih berdasarkan profesi di Kecamatan Gading Cempaka mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, sedangkan untuk pertimbangan irasional berkisar 44,21%, dan sisanya sebesar 2,23% tidak menyatakan sikapnya pada pandangan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka telah masuk dalam kategori pemilih cerdas.

**Grafik 4**  
**Distribusi Perilaku Pemilih Berdasarkan Profesi**  
**Di Kecamatan Gading Cempaka**

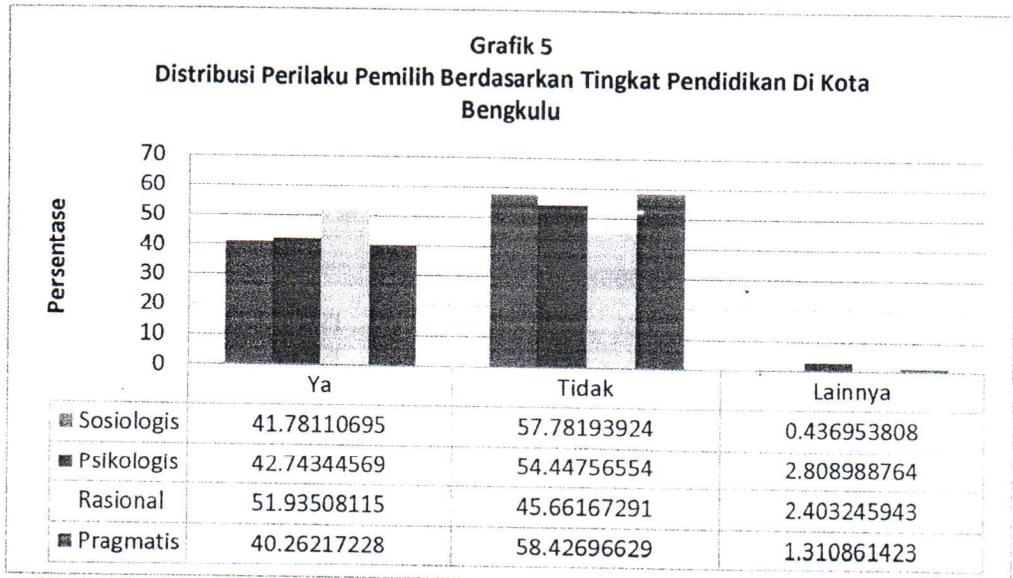


Sumber : Olah data primer 2014

**3. Kecenderungan Perilaku Pemilih (memilih) di Kota Bengkulu**

Kecenderungan perilaku pemilih di kota Bengkulu, dalam kajian penelitian ini diidentifikasi menjadi dua kelompok yakni berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat profesi/jenis pekerjaannya.

Identifikasi pertama, yang dilaksanakan dalam penelitian ini yakni berdasarkan hasil olah data distribusi perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Bengkulu dapat dilihat pada grafik 5 sebagai berikut:

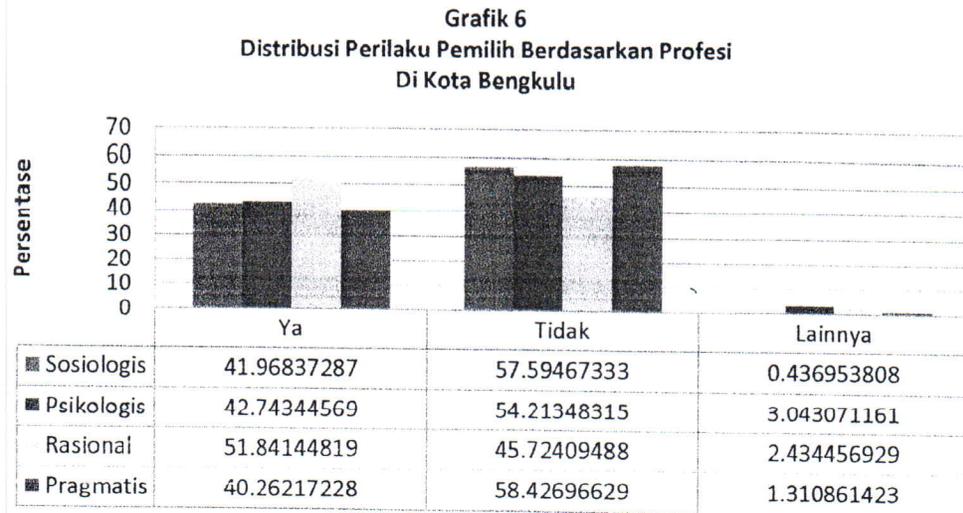


Sumber : Olah data primer 2014

Berdasarkan grafik di atas, dapat kita lihat bersama bahwa perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Bengkulu lebih cenderung tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di Kota Bengkulu secara berturut-turut yakni, 57,78 %, 54,44 % dan 58,42 %. Sedangkan untuk kecenderungan perilaku berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di Kota Bengkulu secara berturut-turut yakni, 41,78 %, 42,74 % dan 40,26 %. Adapun kecenderungan perilaku yang sangat positif ditunjukkan pada

pandangan rasional yakni sebesar 51,93% pemilih berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Bengkulu mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, sedangkan untuk pertimbangan irasional berkisar 45,66 %, dan sisanya sebesar 2,40 % tidak menyatakan sikapnya pada pandangan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin terdidik pemilih maka kecenderungan mereka menjadi pemilih yang cerdas akan semakin tinggi.

Selanjutnya hasil olah data distribusi perilaku pemilih berdasarkan pekerjaan/profesi di Kota Bengkulu dapat dilihat pada grafik 6 sebagai berikut:



Sumber : Olah data primer 2014

Dari grafik di atas dapat kita lihat bersama, bahwa berdasarkan Profesi/pekerjaan di Kota Bengkulu secara hampir sama pada tingkat pendidikan, yakni keseluruhan perilaku pemilih lebih condong tidak mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan pragmatis dalam menentukan pilihannya. Hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di Kota Bengkulu secara berturut-turut yakni, 57,59 %, 54,21% dan 58,42%. Sedangkan untuk kecenderungan perilaku berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pragmatis hal ini dapat dilihat pada persentase perilaku pemilih di Kota Bengkulu secara berturut-turut yakni, 41,96 %, 42,74%, dan 40,26 %. Adapun kecenderungan

perilaku yang sangat positif juga ditunjukkan pada pandangan rasional yakni sebesar 51,84% pemilih berdasarkan profesi di Kota Bengkulu mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, sedangkan untuk pertimbangan irasional berkisar 45,72%, dan sisanya sebesar 2,43% tidak menyatakan sikapnya pada pandangan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kota Bengkulu telah masuk dalam kategori pemilih cerdas.

Berdasarkan pada hasil kecenderungan perilaku pemilih pada karakteristik sosiodemografi menyangkut pendidikan pemilih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Kecenderungan Perilaku Pemilih Pada Karakteristik Sosiodemografi Menyangkut Pendidikan Pemilih**

| No | Perilaku Pemilih | Kecamatan    | Kecamatan      | Rerata |
|----|------------------|--------------|----------------|--------|
|    |                  | Teluk Segara | Gading Cempaka |        |
| 1  | Sosiologis       | 40,31 %      | 43,2 %         | 41,7 % |
| 2  | Psikologis       | 38,25 %      | 47,2 %         | 42,7 % |
| 3  | Rasional         | 50,1 %       | 53,7 %         | 51,9 % |
| 4  | Pragmatis        | 46,8 %       | 47,5 %         | 40,3 % |

Sumber : Olah data primer 2014

Merujuk pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pertama kecenderungan perilaku pemilih pada pendekatan sosiologis hanya 41,7 %, sementara untuk pendekatan psikologis sebesar 42,7 %. Selanjutnya untuk pendekatan rasional pilihan responden

sebanyak 51,9 % dan terakhir untuk pendekatan pragmatis sebanyak 46,8 %.

Meskipun pilihan rasional lebih besar dari pendekatan lainnya namun ini tidak menunjukkan dominasi yang besar dari perilaku pemilih lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengaruh yang diakibatkan

oleh kecenderungan adanya transaksional (jual beli suara) melalui "money politic". Angka 46,8 % dari perilaku pemilih yang pragmatis merupakan fenomena dan praktek demokrasi yang melunturkan kualitas dari pemilu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada responden yang terpengaruh oleh money politic, besaran uang yang mereka peroleh mulai dari 50 ribu sampai 200 ribu rupiah. Ada responden yang menerima uang tiga kali dari caleg yang berbeda sehingga ini membingungkan masyarakat untuk memilih. Akibat yang terjadi dari money politic tersebut, bagi penerima memilih calon yang memberikan uang yang lebih besar. Istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro), menjamur tidak hanya di Kota Bengkulu saja.

Tentu saja hal tersebut di atas harus digarisbawahi baik oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun praktisi politik (partai dan calon) harus mengedepankan pendidikan politik yang baik. Bukan hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan yang mengutamakan berbagai hal dan dengan cara apapun yang merusak demokrasi yang berkualitas.

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Menemukan Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Bengkulu" menunjukkan bahwa:

1. Pertama kecenderungan perilaku pemilih pada pendekatan sosiologis hanya 41,7 %, sementara untuk pendekatan psikologis sebesar 42,7 %. Selanjutnya untuk pendekatan rasional pilihan responden sebanyak 51,9 % dan terakhir untuk pendekatan pragmatis sebanyak 46,8 %.
2. Meskipun pendekatan rasional lebih unggul akan tetapi pilihan tersebut tidak begitu dominan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya praktek money politic yang ada di lapangan pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif.

Berangkat dari persoalan/masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan menunjukkan bahwa dari ketiga pandangan/pendekatan secara teoritis baik sosiologis, psikologis maupun rasional, tidak ada satupun pendekatan yang begitu dominan. Oleh karena itu ada beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi partai politik hendaknya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat

sebagai pemilih secara baik dengan mengedepankan isu-isu dan program yang diusung oleh partai dan melakukan perekrutan kader secara baik.

2. Bagi penyelenggara pemilu diharapkan dapat melakukan sosialisasi pemilu yang berkualitas kepada masyarakat dan dapat menindak secara tegas bila terjadi kecurangan dan juga money politic dengan berkoordinasi kepada penegak hukum.
3. Bagi masyarakat sendiri sebagai pemilih, diharapkan bahwa lebih memprioritas pilihan bagi para calon menyangkut isu dan program yang disampaikan kepada mereka bukan hanya pada keuntungan sesaat atau mengedepankan transaksional arah pilihan.

#### Daftar Pustaka

- Asfar, Muhammad, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Harrop, Martin dan Miller, William, 1987. *Election and Voters (A Comparative Introduction)*, The Macmillan Press Ltd, London.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Kencana, Jakarta.
- Miriam Budiardjo (Penyunting), 1998. *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, Edisi Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Imawan, Riswanda dan Gaffar, Affan, 1993. *Analisis Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*, Laporan Penelitian Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. CV alfabeta, Bandung.